

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

SARI DEWI WARDANI

18622089



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**NAMA : SARI DEWI WARDANI
NIM: 18622089**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

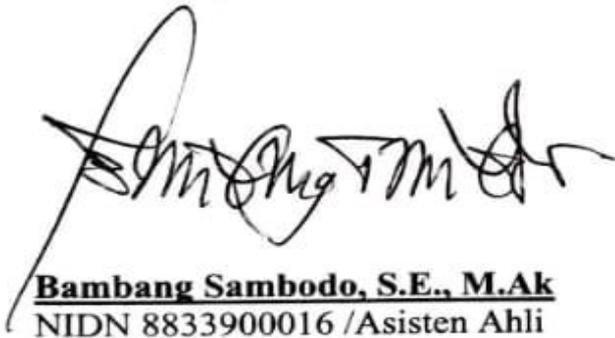
Oleh :

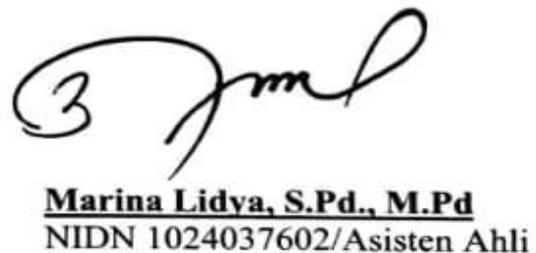
NAMA : SARI DEWI WARDANI
NIM : 18622089

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

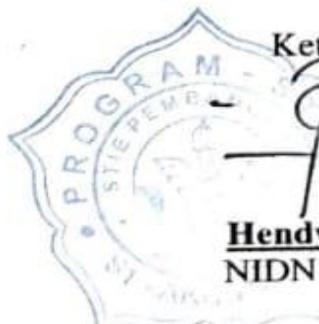
Pembimbing Kedua,


Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN 8833900016 /Asisten Ahli


Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN 1024037602/Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN 1015069101 / Lektor



Skripsi Berjudul
ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Yang Dipersiapkan dan Disusun oleh :

NAMA : SARI DEWI WARDANI
NIM : 18622089

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

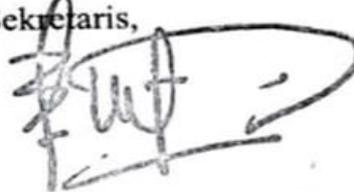
Ketua,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN 1015069101/Lektor

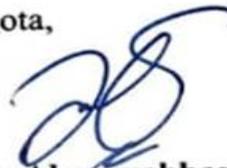
Panitia Komisi Ujian

Sekretaris,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN 1029127801/Lektor

Anggota,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN 1025129302/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Sari Dewi Wardani
Nim : 18622089
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.49
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022

Penyusun,



Sari Dewi Wardani
Sari Dewi Wardani

NIM : 18622089

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk mama yang selalu mendoakan setiap langkahku,
almarhum papa yang selalu ku doakan dan kurindukan,
serta orang-orang terkasih yang selalu mendukungku.

Hari ini impian yang selalu aku ceritakan
telah berhasil aku gapai.

Terima kasih
Aku Mencintai Kalian

HALAMAN MOTTO

Jangan pernah berhenti bermimpi, sekalipun kamu sendiri
karena semesta akan selalu mendukungmu

-Sadewa

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

-QS Ar Ra'd : 11

Sebab sukses, keberhasilan, kemenangan, pencapaian,
prestasi, penghargaan, itu ada dalam hati dan pikiran yang
teguh. Tidak ada dalam kata tunda atau tunggu.

-Titon Rahmawan

Segala di dunia ini berawal dari kemustahilan. Semua terasa
tidak mungkin pada awalnya. Namun, apa pun menjadi mungkin
dengan kerja keras.

-Guntur Alam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran yang bersifat membangun guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang turut serta membantu dan mendukung pembuatan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. Selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan arahan, saran, masukan serta perbaikan pada penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Marina Lidya, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, membantu, memberi saran serta masukan agar skripsi ini selesai dengan baik.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Mama, papa, Kak Indah yang membuatku terus bangkit, berjuang serta selalu memberi dukungan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
10. Keluarga Angkatku di Tanjungpinang Ibu, Ayah, Kak Liza, Kak Aisyah, Kak Icha, Kak Ayu, Kang deden yang selalu memberikan support serta yang selalu mengingatkanku untuk tetap menjaga mental dan kesehatanku agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman-teman se-pergalauan dan se-*perhealing*anku, Tasya, Yuli, Rodika, yang tak hentinya memberikan dukungan, pembelajaran serta motivasi satu sama lain sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
12. Teman-teman Akuntansi Pagi 2 yang telah menemani perjalanan kuliahku dari 2018 hingga penyusunan skripsi ini selesai, terimakasih atas semuanya dan senang bertemu dengan kalian, sukses selalu untuk kita.
13. Untuk ‘sahabatku’ yang tidak ku sebutkan namanya. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang pernah diberikan, sangat berarti. Karena itu selalu membuatku semangat sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik dan selesai.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 20 Juli 2022

Penulis

SARI DEWI WARDANI
NIM. 18622089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Agency Teory</i> (Teori Agensi).....	11
2.2 Otonomi Daerah	12
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	13

2.2.3 Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia.....	14
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.3.1 Pengertian PAD	15
2.3.2 Sumber-Sumber PAD	16
2.3.3 Optimalisasi PAD	21
2.3.4 Kendala Peningkatan PAD.....	22
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	23
2.4.1 Pengertian APBD.....	23
2.4.2 Struktur APBD.....	24
2.4.3 Fungsi dan Tujuan APBD	26
2.4.4 Penyusunan Rancangan APBD.....	28
2.5 Kontribusi PAD	29
2.6 Kemandirian Daerah.....	30
2.7 Kerangka Pemikiran	31
2.8 Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis Data	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	40
3.4.1 Teknik Pengolahan Data	40
3.4.2 Teknik Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau.....	45
4.1.1.2 Visi dan Misi BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	46
4.1.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	46
4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.1.2. Penyajian Data.....	55
4.1.2.1 Kontribusi PAD dan Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	55

4.1.3. Analisis Data	59
4.1.3.1 Analisis Kontribusi PAD.....	60
4.1.3.2 Analisis Rasio Kemandirian Daerah	84
4.2 Pembahasan	98
4.2.1 Kontribusi PAD dsn Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	98
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Realisasi Anggaran Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	6
Tabel 3.1	Kriteria Kontribusi PAD	43
Tabel 3.2	Kriteria Kemandirian Daerah.....	44
Tabel 4.1	Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	55
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.....	56
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.....	57
Tabel 4.4	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	58
Tabel 4.5	Kontribusi PAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021...	60
Tabel 4.6	Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	84

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	47
Gambar 4.2	Grafik Kontribusi PAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	99
Gambar 4.3	Grafik Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	103

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Lampiran 2	Pedoman Wawancara 1
Lampiran 3	Pedoman Wawancara 2
Lampiran 4	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 1
Lampiran 5	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 2
Lampiran 6	Dokumentasi Bersama Narasumber 1 dan 2
Lampiran 7	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 8	Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sari Dewi Wardani. 18622089. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
saridewiwardani.05@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data menggunakan studi Pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

Kontribusi pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 menunjukkan rata-rata sebesar 35% dengan kriteria interval cukup baik dan kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 menunjukkan rata-rata sebesar 54% dengan kriteria interval sedang dan membentuk pola hubungan partisipatif pada tingkat kemandirian Provinsi Kepulauan Riau. Ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap bantuan dari pusat mulai berkurang. Untuk mencapai kontribusi PAD yang sangat baik maka penerimaan PAD harus diatas 50% dari total APBD. sedangkan untuk mencapai tingkat kemandirian yang tinggi maka pendapatan PAD harus diatas 75% dari total dana transfer pusat dan pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin besar pula tingkat kemandirian yang didapatkan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya semakin besar dana transfer pusat dan pinjaman yang diperoleh maka tingkat kemandirian daerah akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Kata Kunci : Kontribusi PAD, APBD, kemandirian daerah

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Marina Lidya, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME CONTRIBUTION AND REGIONAL INDEPENDENCE OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE

Sari Dewi Wardani. 18622089. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang
saridewiwardani.05@gmail.com

This study intends to describe the contribution of regional original income and regional independence of the Riau Islands Province from 2016-2021.

The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The data source used is secondary data. Types of data using library studies, documentation, and interviews.

The contribution of the Riau Islands Province's regional original income in 2016-2021 shows an average of 35% with fairly good interval criteria and the regional independence of Riau Islands Province in 2016-2021 shows an average of 54% with moderate interval criteria and forms a participatory relationship pattern in the level of independence of the Riau Islands Province. This indicates that the level of dependence of the Riau Islands Province on assistance from the center is starting to decrease. To achieve a very good PAD contribution, PAD revenue must be above 50% of the total APBD. Meanwhile, to achieve a high level of independence, PAD income must be above 75% of the total central transfer funds and loans.

It can be concluded that the greater the regional original income obtained, the greater the level of independence obtained, and vice versa. Furthermore, the greater the central transfer funds and loans obtained, the lower the level of regional independence, and vice versa.

Keywords : Contribution PAD, APBD, regional independence

Dosen Pembimbing 1: Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Marina Lidya, S.Pd., M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Elvawati, 2015). Ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (6), menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Indonesia. Otonomi diberikan kepada daerah untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) ialah kewenangan memungut pajak daerah dan daerah sebagai sumber dana daerah, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang meliputi pajak daerah dan biaya tambahan. Kewenangan ini memperkuat sifat dan kedudukan otonomi dalam mendukung kemampuan keuangan daerah dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik selama berada di bawah kendali pemerintah pusat. Adanya undang-undang menegaskan bahwa daerah diharuskan mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, tepat dan bertanggung jawab akan

pemberdayaan masyarakat, lembaga/badan di Indonesia (www.kemenkeu.go.id, 2021).

Bentuk utama suatu daerah menjadi daerah otonom adalah adanya anggaran keuangan daerah tersebut. Singkatnya, daerah otonom membutuhkan kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber keuangannya sendiri. Faktor finansial menjadi salah satu sumber pendanaan pengelolaan pemerintah. Dengan demikian, ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi semaksimal mungkin. Salah satu daerah yang telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah adalah Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi ini berasal dari pemekaran Provinsi Riau dan terbentuk pada tahun 2002. Di bentuknya sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia ditetapkan oleh DPR RI berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002, sebagai sebuah Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah otonom. Dalam pelaksanaan pemda, berdasarkan otonomi daerahnya Provinsi Kepulauan Riau telah mengatur dan mengelola sendiri daerahnya, salah satunya ialah mengelola keuangan. Kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

APBD menjadikan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. APBD juga menjadi penentu tercapainya tujuan ekonomi makro daerah yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai kendala keberhasilan pelaksanaan program masyarakat mandiri. Pada tahun 2020 APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 14,05% atau

Rp1,87 triliun. Penurunan disebabkan Provinsi Kepulauan Riau termasuk daerah yang terdampak pandemi (djp.b.kemenkeu.go.id, 2020).

Sementara di tahun 2021 proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Riau sengaja diturunkan hingga Rp. 700 miliar dikarenakan dampak dari pandemi yang dialami Provinsi Kepulauan Riau. Penurunan ini merupakan salah satu langkah yang diharapkan terjadinya perubahan masa mendatang akan menjadi lebih baik (m.kumparan.com, 2020). Walaupun terjadi perubahan pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tetap dipastikan bahwa di tahun 2021 aktivitas dan program pemulihan ekonomi di tahun 2021 tetap diutamakan (infopublik.id, 2021).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah diartikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pada pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap daerah diharuskan mampu mengembangkan potensi daerahnya, potensi dapat digali melalui pendapatan asli daerah tersebut (Mulyadi, 2011).

PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah bersumber dari sumber-sumbernya dan dipungut sesuai dengan aturan daerah yakni, sesuai pada aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Wulandari & Iryanie (2018). Sumber PAD pada Provinsi Kepulauan Riau bersumber diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (djp.b.kemenkeu.go.id, 2020). PAD memiliki kontribusi yang sangat erat terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kontribusi merupakan iuran atau sumbangan (kepada perkumpulan dan sebagainya). Dapat diketahui seberapa besar tingkat atau besaran pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat melalui kontribusinya (Halim & Kusufi, 2012). Kaitan antara kontribusi PAD pada APBD yakni untuk melihat seberapa besar kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi serta untuk menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Hal utama yang dilakukan dalam melaksanakan desentralisasi ialah mengetahui derajat kemandirian daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil atau belum berhasil dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah atau mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin besar kontribusi pendapatan daerah maka semakin besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kapasitasnya sendiri. Ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah.

Ketergantungan daerah dalam membiayai sumber dana daerahnya sendiri ialah gambaran pmda akan kemandirian daerah terhadap dana transfer pusat. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana tingginya kemandirian daerah menggambarkan partisipasi masyarakat akan hal membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD.

Kemandirian daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Mahardika (Nggilu et al., 2016), dalam membiayai pengeluaran daerah maka dapat dilihat dari seberapa

tinggi kontribusi dari potensi PAD terhadap total PAD serta banyaknya efektifitas target yang direncanakan terhadap realisasinya.

Pada laman m.bisnis.com (2021), menyatakan bahwa Provinsi Bali pada kemandirian daerah di Bali mengandalkan sektor pariwisata, di mana tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan adanya wabah Covid-19, berdasarkan data BPS Bali selama 2020 tercatat memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan persentase 118,32 %. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan periode 2016-2019, dengan rasio kemandirian diatas 50%. Bahkan di tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 504,83%. Nilai rasio kemandirian yang masih rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah di daerah tersebut masih sangat bergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Ini juga terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikatakan pada laman bi.go.id (2021), melemahnya kinerja pendapatan asli daerah di Provinsi NTT di tahun 2020 seperti pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga berdampak terhadap keuangan pemerintah daerah.

Berbagai penelitian tentang kemandirian daerah telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian Daod et al., (2013), yang berjudul “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah Provinsi Aceh”, menghasilkan kemandirian yang tidak dapat melebihi rata-rata total pendapatan daerah sebesar Rp3.260.850.725.239, dengan rata-rata 10,85% kategori kurang, hal ini disebabkan kontribusi PAD yang belum maksimal.

Kemudian hal yang berbeda pada penelitian Sahrudin (2020), menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat perkembangan penerimaan PAD dalam pola konsultif yang berarti dianggap sedikit mampu melaksanakan desentralisasi dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 37,80%.

Gambaran untuk mengetahui besaran kontribusi PAD dan tingkat kemandirian daerah maka perlu dilihat perkembangan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah yang berada di laporan keuangan yang telah dibuat oleh para penanggung jawab. Berikut laporan perkembangan realisasi PAD Provinsi Kepulauan Riau yang datanya bersumber dari BPKAD Provinsi Kepulauan Riau, yang berisikan perkembangan realisasi anggaran sumber-sumber pendapatan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pekembangan Realisasi Anggaran Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi Kepri Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi Sumber Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer Pusat (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	
2016	1.079.309.741.998,68	1.812.089.029.643	23.458.848.921	2.914.857.620.562,68
2017	1.094.788.614.304,54	2.156.268.926.062	1.179.960.000	3.252.237.500.366,54
2018	1.220.768.246.945,10	2.278.002.977.357	1.236.000.000	3.500.007.224.302,10
2019	1.311.704.305.173,32	2.626.462.699.205	1.284.000.000	3.939.451.004.378,32
2020	1.195.637.693.103,26	2.317.188.590.222	1.483.900.000	3.514.310.183.325,26
2021	1.079.309.741.998,68	2.406.531.963.533	27.573.618.209	3.809.875.862.443,47

Sumber : BPKAD Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat selama enam tahun berturut-turut realisasi sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang pertama memberikan kontribusinya diperoleh dari pendapatan transfer pusat, lalu

disusul pendapatan asli daerah, kemudian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 realisasi sumber-sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan dan juga penurunan. Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11,6%. Lalu tahun 2017 ke tahun 2018 naik sebesar 7,6%. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 12,6%. Akan tetapi di tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar -10,8% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 ke 2021 sebesar 8,4%. Kemudian pendapatan sumber-sumber pendapatan daerah yang tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp3.939.451.004,378.32 dan pendapatan terendah diperoleh sebesar Rp2.914.857.620.562,68 di tahun 2016.

Berdasarkan rincian penjelasan dan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul: “**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

Bagaimanakah kontribusi pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan terhindar dari kekeliruan, maka peneliti membuat Batasan masalah. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada realisasi anggaran pendapatan daerah dengan periode pengamatan 6 tahun mulai tahun 2016-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

Untuk mendeskripsikan kontribusi pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam hal kontribusi PAD dan tingkat kemandirian daerah. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada, serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan penulis dalam bidang pemerintahan daerah khususnya pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, tingkat kemandirian daerah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan menjadi bahan acuan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang pemerintahan daerah khususnya pada pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengukuran kemandirian daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah yang melandasi penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan juga sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini mendeskripsikan mengenai kajian teori dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat menjadikan landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang jenis penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian, teknik pengumpulan data pada penelitian dan teknik analisis data serta jadwal penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini akan membahas gambaran umum dari objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan diberikannya saran-saran sehubungan dengan pencapaian atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen and Meckling, definisi teori keagenan ialah sebuah kontrak antara principal dengan agent, yang artinya terdapat hubungan antara dua pihak atau lebih, salah satu pihak menyetujui untuk melakukan tindakan sesuai dengan persetujuan pihak lain, dijelaskan dalam teori ini juga bahwa masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak menilai, mengevaluasi kinerja keuangan pemda dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah (Zelmiyanti, 2016)

Menurut Halim dan Syukriy (Erawati & Suzan, 2015), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori principal-agent menganalisis kesepakatan kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) menandatangani kontrak dengan pihak lain (agen) dengan harapan agen akan melakukan pekerjaan yang diinginkannya (dalam hal ini ada pendelegasian wewenang).

Menurut Pratiwi dalam Rofiq & Arza (2021), teori keagenan merupakan peran pemerintah pusat bertindak sebagai principal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah bertindak sebagai agen

untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Oleh sebab itu hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menyerahkan otoritas kepada pemerintah daerah, di mana otoritas tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Kemudian dengan adanya otoritas tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan pemda dalam menjalankan pemerintahannya atas memanfaatkan sumber daerah yang berpengaruh akan sumber utama pendapatan. Adanya sumber utama pendapatan di pemda dapat meningkatkan aspek keuangan untuk memaksimalkan infrastruktur dan layanan masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Sujarweni (2021), Otonomi daerah ialah kebebasan untuk membuat keputusan politik atau administratif, tetapi didasarkan pada undang-undang. Otonomi daerah bebas menentukan kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan daerah selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Simanjuntak (2013), otonomi daerah ialah hak kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengelola tugas-tugas pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Menurut Jasin (2019), otonomi daerah ialah mewujudkan kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan seluruh sumber daya, aset, dan potensi sumber daya daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, “merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan otonomi daerah ialah daerah yang mempunyai suatu otoritas atau hak untuk menetapkan dan menjalankan pemerintahannya sendiri, akan tetapi tetap berlandaskan undang-undang yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Firdausy (2018), tujuan otonomi daerah di antaranya:

- a. Pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dapat di percepat.
- b. Sistematisasi pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dengan menyediakan infrastruktur, pembangunan sistem pertanian, industri kecil dan kerajinan manusia, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat di percepat.
- c. Mengembangkan mutu sumber daya manusia yang disesuaikan berdasarkan potensi dan kepentingan daerah dengan menyediakan anggaran pendidikan yang sesuai.

- d. Mendukung pembangunan pada semua daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Sedangkan menurut Sujarweni (2021), tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah :

- a. Menghindari penyatuan kekuasaan
- b. Terbentuknya pemerintahan secara efektif dan efisien
- c. Masyarakat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di setiap daerah.
- d. Adanya keseimbangan publik
- e. Masing-masing daerah harus bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing.

2.2.3 Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik artinya sebuah negara yang kepala pemerintahannya bernama presiden yang dipilih oleh rakyat, kekuasaan presiden tersebut dibatasi oleh konstitusi.

Dalam pemerintahannya Indonesia memilih cara desentralisasi, desentralisasi merupakan penggantian tanggung jawab kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan sumber dayanya, hal ini dimaksud daerah bisa merasakan secara langsung kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan pusat di setiap daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom terdiri dari tiga daerah di antaranya; a) Daerah Provinsi, dipimpin oleh

Gubernur; b) Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Bupati; c) Daerah Kota, dipimpin oleh Walikota.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian PAD

Menurut Firdausy (2018), PAD merupakan pendapatan bersumber dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Siregar (2017), PAD ialah penerimaan pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berada di daerahnya serta dipungut sesuai peraturan daerah.

Putra (2018), PAD merupakan pembiayaan atas perwujudan akan daerah yang melaksanakan otonomi daerah bersumber dari pajak daerah, pembagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, menyatakan PAD yaitu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Bertujuan menyerahkan keleluasaan terhadap daerah untuk mencari pendanaan terhadap perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang diperoleh pemda tidak hanya dari penggunaan sumber daya milik pemda, tetapi juga dari penyediaan kegiatan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat setempat (Subekan & Hartoyo, 2012). Sehingga dapat disimpulkan PAD ialah penerimaan bersumber

dari sumber-sumber yang telah ditetapkan, kemudian dipergunakan untuk kepentingan publik.

2.3.2 Sumber-Sumber PAD

Sumber-sumber yang dapat dikembangkan oleh daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (Subekan & Hartoyo, 2012) yaitu:

a. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang sudah ditetapkan pemungutannya pada peraturan daerah, dan imbalan tidak diterima oleh wajib pajak secara langsung.

Berikut Jenis pendapatan pajak untuk provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan di air
3. Bea balik nama kendaraan bermotor
4. Bea balik nama kendaraan di air
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
6. Pajak air permukaan
7. Pajak rokok

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak:

1. Hotel
2. Restoran
3. Hiburan
4. Reklame
5. Penerangan jalan
6. Pengambilan bahan galian golongan c

7. Lingkungan
8. Mineral bukan logam dan batuan
9. Parkir
10. Sarang burung walis
11. Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
12. BPHTB

b. Retribusi daerah

Pungutan dari masyarakat yang telah menggunakan fasilitas tertentu. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum, merupakan jasa yang diberikan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum pada provinsi terdiri dari retribusi :
 1. Pelayanan Kesehatan
 2. Penggunaan kendaraan bermotor
 3. Penggantian beban cetak peta
 4. Pelayanan tera/tera terulang
 5. Pelayanan pendidikan.

Sementara retribusi jasa umum pada kabupaten/ kota terdiri dari retribusi :

1. Pelayanan Kesehatan

2. Pelayanan persampahan/kebersihan
 3. Penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
 4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 5. Pelayanan parker di tepi jalan umum
 6. pelayanan pasar
 7. Pengujian kendaraan bermotor
 8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 9. Penyediaan dan penyedotan kakus
 10. Pengolahan limbah cair
 11. Penggantian beban cetak peta
 12. Pelayanan pendidikan
 13. Pelayanan tera/tera ulang
 14. Pengendalian Menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha, ialah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha provinsi terdiri dari retribusi jasa usaha :
1. Pemakaian kekayaan daerah
 2. Tempat pelelangan
 3. Tempat penginapan, pesanggrahan, villa
 4. Pelayanan kepelabuhan
 5. Tempat rekreasi dan olahraga
 6. Pengolahan limbah cair

7. Pelayanan kepelabuhan
8. Tempat rekreasi dan olahraga
9. Pengolahan limbah cair
10. Penjualan produksi usaha daerah
11. Tempat khusus parkir
12. Penyeberangan di air

sementara, retribusi jasa usaha kabupaten/kota terdiri dari retribusi :

1. Pemakaian kekayaan daerah
 2. Pasar grosir atau pertokoan
 3. Tempat pelelangan
 4. Terminal
 5. Tempat khusus parkir
 6. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 7. Rumah potong hewan
 8. Penyeberangan di air
 9. Penyediaan atau penyedotan kakus
 10. pelayanan kepelabuhan
 11. Tempat rekreasi dan olahraga
 12. Pengolahan limbah cair
 13. Penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu, ialah pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDM, sarana atau prasarana tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga

kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu pada provinsi terdiri dari retribusi :

1. Izin trayek
2. Izin usaha perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk kabupaten/kota terdiri dari retribusi izin:

1. Mendirikan bangunan
2. Tempat penjualan minuman beralkohol
3. Gangguan
4. Trayek
5. Perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan bersumber pada badan usaha milik daerah ataupun lembaga lainnya. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Dividen atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Dividen atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Dividen atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan yang bersumber selain tiga jenis pendapatan di atas. Penerimaan ini terdiri dari objek pendapatan di antaranya :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan
15. Hasil pengelolaan dana bergulir.

2.3.3 Optimalisasi PAD

Putra (2018), Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PAD sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan pajak dan kewajiban daerah akan perkembangan harga dan inflasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaharui tarif pajak daerah yang sebelumnya sudah ditetapkan.

- b. Menentukan objek pajak baru berdasarkan undang-undang yang sesuai untuk calon wajib pajak baru di daerahnya.
- c. Meningkatkan pengelolaan PAD dengan Kerjasama pada Lembaga/badan swasta dalam pajak tertentu agar efektif dan efisien.
- d. Mendorong investor baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan membentuk lingkungan dan iklim investasi terhadap pembangunan ekonomi.
- e. Meningkatkan sistem intensif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam mengelola pendapatan yang dilakukan.
- f. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan PAD ialah dengan melihat kondisi sosial masyarakat, berarti optimalisasi PAD tidak hanya berfokus terhadap beberapa aspek saja, namun juga melihat dampak dari kapasitas masyarakat.

2.3.4 Kendala Peningkatan PAD

Kendala yang umumnya terjadi Putra (2018) yakni :

- a. Lemahnya kemampuan daerah untuk merumuskan kebijakan akan memanfaatkan potensi daerah bagi sebesar-besarnya kemajuan daerah serta bagi peningkatan kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat di daerahnya.
- b. Lemahnya kemampuan aparat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu.

- c. Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak
- e. Terdapat infrastruktur kurang memadai dalam pelaksanaan pengembangan potensi pajak.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.4.1 Pengertian APBD

Menurut Sujarweni (2021), APBD yakni rencana keuangan yang dibuat pemda setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disesuaikan berdasarkan peraturan daerah. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember merupakan Tahun anggaran APBD dalam satu tahun.

Menurut Subekan & Hartoyo (2012), APBD disetujui DPRD sebagai rencana keuangan di tiap tahunnya. APBD merupakan bentuk rill pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 APBD, ialah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh sebab itu APBD ialah rancangan keuangan yang dibuat pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan di daerahnya.

2.4.2 Struktur APBD

Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; c) pembiayaan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ialah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang potensinya diberikan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Transfer Pusat

Siregar (2017), dana transfer pusat merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer pusat terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ialah dana yang diperoleh dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, meliputi :

a. Hibah atau bantuan dari pemerintah, badan Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas.

c. Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada Kabupaten/Kota

- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, serta bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lainnya.

2.4.3 Fungsi dan Tujuan APBD

Tujuan APBD menurut Putra (2018), ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan daerah agar meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Subekan & Hartoyo (2012), APBD memiliki fungsi antara lain :

- a. Fungsi otorisasi

Menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran bersangkutan. Tanpa adanya APBD, pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada masyarakat yang menjadi pendapatan anggaran. Demikian juga halnya belanja, pembayaran kepada pihak lain tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya APBD.

- b. Fungsi perencanaan

Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dapat diakomodasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Penyusunan rencana ini harus mengacu pada anggaran yang dialokasikan satuan kerjanya.

c. Fungsi pengawasan

Merupakan anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi ini terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi aparat pengawas internal ataupun eksternal pemerintah.

d. Fungsi alokasi

Merupakan anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi

Merupakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBD hendaknya dijadikan sebagai instrumen dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah bersangkutan.

f. Fungsi stabilisasi

Merupakan anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, inflasi/ deflasi misalnya, maka anggaran daerah harus dapat difungsikan untuk menstabilkan perekonomian.

Menurut Ateng Syafruddin (Wulandari & Iryanic, 2018), fungsi APBD yaitu:

- a. Dasar dari kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran

- b. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah
- c. Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan oleh yang berhak melaksanakan pengawasan dapat lebih baik.

2.4.3 Penyusunan Rancangan APBD

Subekan & Hartoyo (2012), penyusunan rancangan APBD berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Mendagri No. 13 tahun 2006. Sementara itu pemerintah daerah juga harus berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit setiap tahun. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara juga telah memberikan gambaran mekanisme penyusunan anggaran daerah. Mekanisme penyusunan APBD berdasar undang-undang sebagai berikut;

- a. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. DPRD bersama pemerintah daerah membahas kebijakan umum APBD
- c. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

- d. Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) dengan mengacu pada PPAS yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD.
- e. RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
- f. Hasil pembicaraan RKA-SKPD merupakan usulan anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah.
- g. Berdasar RKA_SKPD dari semua SKPD, pejabat pengelola keuangan daerah menyusun RAPBD
- h. RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Jika RAPBD dapat disetujui bersama, maka akan ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

2.5 Kontribusi PAD

Menurut Handoko (Widyaningsih et al., 2018), kontribusi ialah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan. Berarti kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan sumbangsih yang bersumber dari sesuatu hal atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Sedangkan menurut kamus ekonomi (Wijayanti et al., 2017), kontribusi ialah segala sesuatu yang diberikan untuk pihak lain dalam rangka tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan kontribusi PAD ialah iuran atau sumbangan yang dapat diberikan dalam banyak bentuk yang akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahnya daerahnya. Kemudian Kontribusi PAD dapat diukur dari pendapatan hasil daerah dibagi dengan total pendapatan daerah.

2.6 Kemandirian Daerah

Halim & Kusufi (2012), kemandirian keuangan daerah menunjukkan suatu daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintahannya melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

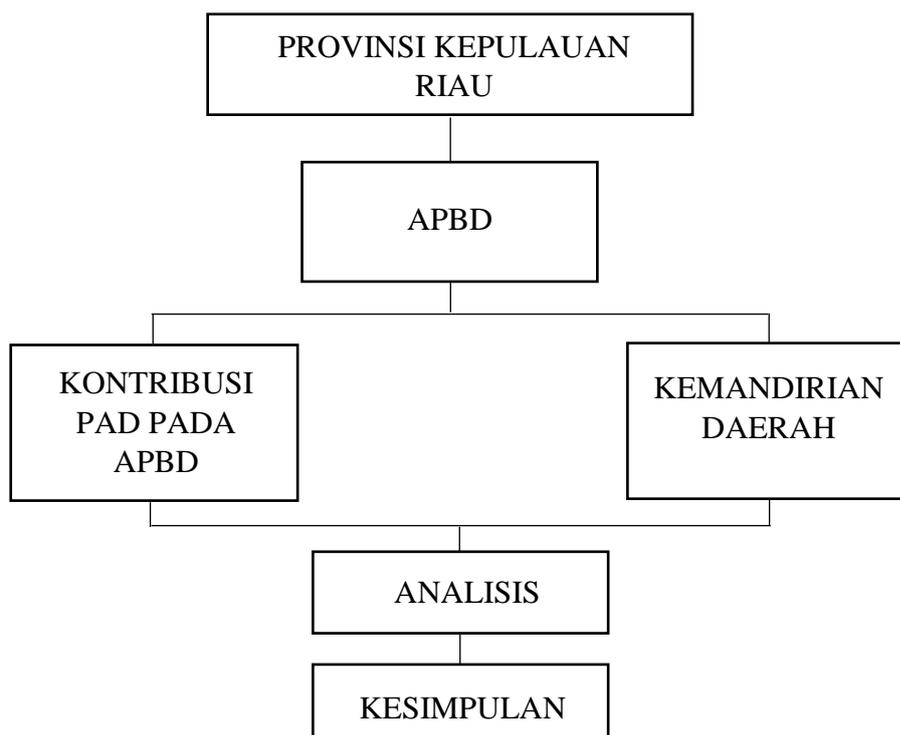
Menurut Mahardika (Nggilu et al., 2016), dalam membiayai pengeluaran daerah perlu diketahui kemampuan keuangan daerahnya agar dapat terlihat seberapa besar kontribusi yang diperoleh dari sumbernya dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Membandingkan jumlah PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah merupakan cara menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah dan hasilnya akan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren. Oleh

sebab itu semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang diolah, (2021)

2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil judul "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Kepulauan Riau". Dari pengamatan yang dilakukan ada beberapa penelitian relevan sebagai rujukan sebagai berikut;

1. Sahrudin & Hairun Yasin (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin & Yasin (2020), Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Volume 7 Nomor 2, Juli-Desember 2020. ISSN: 2774-4020. Berjudul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah Di Kabupaten Bima”. Tujuan penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bima. penelitian data ini menggunakan data primer dan data sekunder. pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, peneliti lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Bima dilihat dari perkembangan penerimaan PAD pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 100,70% dan tingkat kemandirian Kabupaten Bima diukur berdasarkan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 40,64% termasuk dalam pola konsultif/ sedang, dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukkan kinerja keuangan positif.

2. Verenika Geovani & Endah Susanti (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Geovani & Susanti (2020), *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb. Volume 4 Nomor 1, April 2020. ISSN: 2622-5336. Berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli

Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Berau”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dan kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten berau secara rata-rata tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yakni data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan diduga tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau secara rata-rata selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah cukup efektif adalah ditolak, karena berdasarkan hasil analisis rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Berau adalah sebesar 119,27% yaitu berada pada interval “sangat efektif”. Hipotesis kedua yang menyatakan diduga kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Berau secara rata-rata selama tahun 2011 sampai tahun 2018 adalah cukup baik juga ditolak karena berdasarkan hasil analisis secara rata-rata tingkat kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Kabupaten Berau adalah 10,24% yaitu berada pada interval “kurang”.

3. T. Iskandar Daod, Abu Bakar Hamzah, Muhammad Nasir (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Daod et al. (2013), Jurnal Ilmu Ekonomi. Universitas Syiah Kuala, Vol.1, No.4 November 2013. ISSN 2302-0172. Berjudul “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Provinsi Aceh”. Tujuan penelitian ini menganalisis kontribusi, efisiensi dan efektivitas kemampuan PAD terhadap kemandirian daerah dan respon PAD terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) di Provinsi Aceh. Metode

yang digunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kemandirian Provinsi Aceh tahun 1996-2011 masih kurang dengan rata-rata 10.85 persen bahkan tidak sampai melebihi seperempat dari pada rata-rata total pendapatan daerah. Secara rata-rata realisasi PAD yang berhasil dipungut oleh pemerintah Provinsi Aceh dipergunakan untuk menutup biaya pungutan tidak efisien yaitu sebesar 871,1 persen dan cukup efektif dengan rata-rata 86.42 persen. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 1.953335 bertanda positif dan signifikan dimana $t \text{ tabel} > t \text{ statistik}$ yang berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) sebesar 1 persen mampu mendorong peningkatan PAD sebesar 1.95 persen berarti pertumbuhan penerimaan PAD sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah (PDRB), berarti pula PAD dianggap elastis terhadap PDRB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) adalah responsif terhadap penerimaan PAD provinsi, dimana struktur PAD mulai berjalan dengan baik.

4. Krest D Tolosang

Penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No.03. Tahun 2018. Berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data

menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota tomohon.

5. Tri Utari Handayani dan Erinoss

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Erinoss (2020). Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Universitas Negeri Padang, Volume 2, No. 1, Februari 2020. ISSN: 2656-3649. Berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Tujuan Penelitian untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2018. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian pendapatan asli daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien beta sebesar 0.081 dan sebesar 0.000 nilai signifikasinya. Kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal karena nilai koefisien beta -0,30 dengan signifikannya sebesar 0.318. variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tujuannya memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, tidak dapat mempengaruhi dijadikan sebagai variabel moderasi hal ini dikarenakan nilai signifikasinya lebih besar dari yang

ditetapkan. semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah maka akan semakin kecil kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga kemandirian keuangan daerah juga semakin rendah.

6. Boguslaw Kotarba & Anna Kolomycew

Penelitian yang dilakukan oleh Kotarba & Kolomycew (2014), *Journal of Universal Excellence. Department of Political Science, University of Rzeszow*. Vol 3, No 4, pp A18-A35 December 2014. Berjudul “Financial Independence of Local Government Units in Poland”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi aktual dari pemerintah daerah dalam pembentukan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Polandia mungkin menimbulkan keraguan. umumnya, peraturan penting untuk otonomi keuangan unit pemerintah daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang Konstitusi tidak menimbulkan keberatan. Namun, ketentuan UU khusus yang mengatur masalah ini lebih rinci. Akibatnya, unit pemerintahan sendiri memiliki dampak yang sangat terbatas pada jumlah pendapatan dan kebebasan membelanjakan sumber daya yang tersedia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis data penelitian kualitatif yang dikaji secara deskriptif, yang mana penelitian ini untuk menguraikan dan memaparkan kontribusi pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mengukur kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Nazir (2017), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Indrawati (2018), merupakan penelitian yang melibatkan analisis data berupa deskripsi dan data tersebut tidak langsung dapat dikuantifikasi. Pengkuantifikasian data kualitatif dilakukan dengan pemberian kode atau kategori. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mentransformasi objek penelitian ke dalam bentuk yang dapat dipresentasikan.

Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang kontribusi pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah, kemudian hasilnya akan dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk presentase dan dikategorikan sesuai dengan pengkuantifikasian data.

3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016), jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang berupa data target dan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2016 sampai tahun 2021, yang diperoleh dari <https://kepri.bpk.go.id> dan <https://bpkad.kepriprov.go.id>, serta data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti sejarah Provinsi Kepulauan Riau, Visi dan Misi Kepulauan Riau, struktur organisasi Provinsi Kepulauan Riau dan untuk memperkuat penelitian ini di dukung dengan data wawancara.

Sesuai dengan Indriantoro & Supomo, (2018) yang menyatakan bahwa data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016), pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan :

1. Studi Pustaka

menurut Zed (2014) studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan data pendukung

dari literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal serta penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Menurut Widoyoko (2012), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, laporan kegiatan, catatan harian dan lain sebagainya. Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mendownload laporan keuangan Provinsi Kepulauan Riau melalui website <https://kepri.bpk.go.id> dan <https://bpkad.kepriprov.go.id> mulai periode 2016 sampai dengan periode 2021.

3. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014), wawancara merupakan digunakan agar menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur. Wawancara ini akan dilakukan di BPKAD Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan rekaman handphone.

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif ini, hasil dari pengumpulan data yang telah dikelola peneliti, dimana peneliti akan mengolah kembali data-data tersebut dengan teliti dan benar. Setelah data dianggap benar dan sempurna, maka dapat langsung dilakukan analisis data secara bersamaan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020), mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui *data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Tahap pengumpulan data pada penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan mendokumentasi data yang bersumber dari website yang sudah jelas akan kredibelnya. Data yang diambil berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2016-2021, struktur organisasi, peraturan daerah dan Undang-Undang, dan data lain-lain melalui <https://bpkad.kepriprov.go.id> dalam bentuk file pdf. Sementara wawancara dilakukan secara langsung di BPKAD Provinsi Kepulauan Riau untuk mempertanyakan permasalahan yang ada di penelitian.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah mengumpulkan data tahap selanjutnya melakukan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta membuang yang tidak diperlukan. Pada tahap reduksi

ini data yang dikumpulkan akan dikelompokkan sesuai dengan yang dibutuhkan agar dapat difokuskan, seperti target dan realisasi anggaran PAD. Data yang sudah dikelompokkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan.

c. ***Data Display (Penyajian Data)***

Setelah di reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini peneliti memasukkan hasil dari reduksi data ke dalam tabel sederhana sesuai kelompok dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis agar ditampilkan secara selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

d. ***Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)***

Langkah keempat dalam analisis data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses pengolahan data. Tahap ini dimaksudkan sebagai aktivitas penarikan arti data yang telah ditampilkan. Hasil dari kesimpulan akan dijadikan data yang berkaitan dengan penelitian mengenai kontribusi pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.2 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2016), Analisis data adalah proses sistematis meneliti dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya, sehingga mudah untuk memahami dan berbagi hasil dengan orang lain. Dalam penelitian ini digunakan analisis dekriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka melainkan langsung menganalisis dokumen yang telah didapatkan sehingga memberikan informasi kepada para pembaca. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio seperti rasio kontribusi PAD, dan Rasio Kemandirian daerah. Sehingga menghasilkan kriteria potensi PAD dalam upaya mengukur tingkat kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.1 Rasio Kontribusi PAD

Rasio Kontribusi PAD merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasinya, begitupula sebaliknya. Untuk melihat perkembangan kontribusi PAD Provinsi Kepulauan Riau dalam 6 tahun penelitian yaitu dari tahun 2016-2021 dapat menggunakan rumus :

$$K = \frac{PAD_n}{APBD_n} \times 100\%$$

Keterangan :

K = Kontribusi

PAD_n = Realisasi PAD tahun ke n

APBD_n = Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun ke n

Adapun untuk menentukan tingkat Kontribusi PAD mendasar berdasarkan tabel interpretasi nilai kontribusi berikut ini :

Tabel 3.1
Kriteria Kontribusi PAD

Persentase (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Baik
41%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : *Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Handoko, (2013).*

3.4.2 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan suatu daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai sendiri jalannya roda pemerintahannya, hal ini ditunjukkan dari besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yakni bantuan pemerintah pusat serta dari pinjaman daerah.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pusat serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, (2016).

Adapun untuk menentukan tingkat kemandirian daerah mendasar berdasarkan tabel interpretasi nilai kemandirian daerah berikut ini :

Tabel 2.2
Kriteria Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah	Interval	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam Rizal, (2017)

Pola hubungan :

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat yang mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerahnya.
4. Pola hubungan delegative, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/20>
- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 246–266.
- Daod, T. I., Hamzah, A., & Nasir, M. (2013). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 1(4), 1–9.
- Elvawati. (2015). Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah. *Jurnal Pelangi*, 6(1), 17–22. <https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.277>
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3259–3266.
- Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Geovani, V., & Susanti, E. (2020). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Berau. 4(1), 54–60.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Indrawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi)*. PT Refika Aditama.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Februari 2021*. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/pages/laporan-perekonomian-provinsi-nusa-tenggara-timur-februari-2021.aspx>.
- Kotarba, B., & Kołomycew, A. (2014). Financial Independence of Local Government Units in Poland. *Journal of Universal Excellence*, 3(4), 18–35. <https://www.fos-unm.si/>
- M, N., Nursadik, M., & Yunus, M. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Mahmudi. (2016). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian (Kesebelas)*. Ghalia Indonesia.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Nurkhayati, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 11(1).
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.19109//ifinace.v5i2.4911>
- Pribadi, M. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Universitas Mulawarman*, 3(2), 34–

- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers.
- Rizal, Y. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 117–126.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 705–719.
- Sahrudin. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan Ips*, 10(2), 150–156.
- Sahrudin, & Yasin, . Hairun. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 7, 251.
- Sahrudin, & Yasin, . Hairun. (2020b). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 7(2), 251.
- Sambodo, B., & Putri, F. R. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual)* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Sofi, Irfan. (2021). *Mendorong Kemandirian Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kemenkeu.Go.Id.*

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>.

Subekan, A., & Hartoyo, N. (2012). *Keuangan Daerah Terapi Atasi Kemiskinan*. Alta Pustaka.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)* (20th ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Ketiga). Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.

Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Otonomi Daerah Nomor 12.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Pendapatan Daerah Nomor 33.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Pemerintah Daerah Nomor 23.

Widoyoko, S. E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Widyaningsih, Y. E., Astuti, W., & Utami, K. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018 (Analysis of the Effectiveness and Contribution of Local Original Revenue to Regional Revenue in. *Ebbank*, 9(1), 22–31.

Wijayanti, R., Askandar, N. S., & Amin, M. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2), 14–27.

- Wiratmini, Ni Putu Eka. (2021). *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Bali Terdampak Pandemi*. M.Bisnis.Com.
<https://m.bisnis.com/amp/read/20211116/538/1466494/rasio-kemandirian-keuangan-daerah-di-bali-terdampak-pandemi>.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (Ketiga)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

CURRICULUM VITAE



1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sari Dewi Wardani
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/ 05 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum. Bukit Raya Blok Bromo No. 38
Usia : 26 Tahun
Agama : Islam
Nomor *Handphone* : 0823-8713-2242
Email : saridewiwardani.05@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk-Keluar)
SD	SDN 95 Jambi	2001-2007
SMP	MTS Mahdaliyah Jambi	2007-2010
SMK	SMKN 1 Jambi	2010-2013
D1	D1 Palcomtech	2013-2014
S1	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2018-2022

3. PENGALAMAN KERJA

No.	Instansi	Jabatan	Tahun (Masuk-Keluar)
1.	PT Hypermart Jambi	Customer service, Kasir, Admin Ekspedisi	02 Juli 2012- 30 Sept 2012
2.	PT Hypermart Jambi	Kasir	Juni 2013-Juli 2013
3.	PT Agung Automall Jambi	Personal Admin	23 Juni 2014- 14 Juli 2014
4.	PT Ganesha Operation Tanjungpinang	Customer Service	16 Maret 2015- 24 Juli 2021

4. PENGALAMAN MENULIS BUKU FIKSI

Untuk 2020 : Dariku Yang Menyaksikan. (2021). Ellunar Publish. ISBN : 978-623-204-766-2.